

Bupati Buton Selatan H Muh Adios dan Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Temui BPJN Sultra Bahas Integrasi Jalan Nasional untuk Dorong Ekonomi, Konektivitas Jadi Kunci



Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

SULTRA, BP-emerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) bersama Pemerintah Kota Baubau memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mendorong pembangunan infrastruktur jalan yang terintegrasi, sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan kepulauan.

Langkah tersebut ditandai melalui audiensi Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., MBA, yang didampingi

Lanjut ke Hal: 7

LKPD 2025 Diserahkan ke BPK, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dorong Tata Kelola Keuangan Bersih



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penyerahan tersebut ber-

langsung di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Buton Selatan H Muhammad Adios SSos MBA bersama para kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara yang secara serentak menyerahkan laporan keuangan masing-masing daerah kepada BPK.

Penyerahan LKPD un-

audited tersebut merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah yang harus dipenuhi paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Pemerintahan Negara.

"Penyerahan LKPD ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi setiap pemerintah daerah sebagai

Lanjut ke Hal: 7

ASN Bapas Baubau Naik Pangkat, Kepala Bapas Baubau Nasiruddin Tekankan Integritas dan Inovasi



Laporan: Firman

BAUBAU, BP -Upacara kenaikan pangkat pegawai di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Baubau, Rabu (1/4/2026), tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi dimaknai sebagai strategi penguatan kinerja dan integritas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemasarakatan.

Kegiatan yang digelar di halaman kantor Bapas Baubau tersebut dipimpin langsung Kepala Bapas Kelas II Baubau, Nasirudin, serta diikuti oleh

seluruh pejabat struktural dan staf. Upacara berlangsung tertib dan khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap capaian karier para pegawai.

Komitmen peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu pesan utama dalam kegiatan tersebut. Bapas Baubau menegaskan akan terus memperkuat fungsi pembimbingan kemasarakatan, pendampingan, serta pengawasan terhadap klien pemasarakatan di wilayah kerjanya.

Dalam amanatnya, Nasirudin menekankan

bahwa kenaikan pangkat harus dipahami sebagai bentuk kepercayaan negara yang melekat dengan tanggung jawab yang lebih besar.

"Kenaikan pangkat bukan sekadar hak administratif, melainkan amanah yang menuntut peningkatan integritas dan kualitas kinerja," ujar Nasirudin.

Ia menambahkan, para pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat diharapkan mampu menjadi teladan serta mendorong inovasi dalam pelayanan

Lanjut ke Hal: 7

Ruang Kelas Terbatas, SDN 1 Masiri Buton Selatan Tetap Bertahan Enam Hari Sekolah

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Ketimpangan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Buton Selatan mendorong sejumlah sekolah dasar menerapkan kebijakan sistem pembelajaran yang berbeda, mulai dari lima hingga enam hari sekolah, sebagai bentuk penyesuaian kondisi di lapangan.

Kondisi ini terlihat di SDN 1 Masiri yang masih mempertahankan sistem enam hari sekolah. Sekolah yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga tersebut memilih tidak mengubah jadwal belajar lantaran adanya penolakan dari orang tua siswa.

Kepala SDN 1 Masiri, Jalaluddin, S.Pd, mengatakan bahwa rencana penerapan lima hari sekolah sempat dipertimbangkan



Kepala SDN 1 Masiri, Jalaluddin, S.Pd

sebelumnya. Namun, aspirasi orang tua menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

"Awalnya kami ingin menerapkan lima hari sekolah menyesuaikan program MBG, tetapi karena adanya komplain dari orang tua, akhirnya tetap enam hari," ujar Jalaluddin, Selasa (31/3/2026).

Ia menambahkan, pembelajaran tatap muka penuh masih menjadi pilihan utama karena dinilai lebih efektif dibandingkan sistem daring. Menurut-

ya, keterbatasan perangkat teknologi menjadi kendala utama dalam penerapan belajar dari rumah.

"Belajar dari rumah kurang efektif karena tidak semua orang tua memiliki ponsel pintar, dan siswa cenderung kurang fokus," katanya.

Di sisi lain, beberapa sekolah seperti SDN 1 Bangun dan SDN 1 Pogalampa telah lebih dahulu menerapkan sistem lima hari sekolah. Kebijakan tersebut diambil melalui kesepakatan antara pihak sekolah, orang tua murid, serta koordinasi dengan Dinas Pendidikan Buton Selatan.

Dalam sistem lima hari sekolah, kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih panjang, dimulai pukul 07.30 hingga 16.00 WITA, yang kemudian diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler pada siang hingga sore hari.

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Selatan H Muh Adios dan Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Temui BPJN Sultra Bahas Integrasi Jalan Nasional untuk Dorong Ekonomi, Konektivitas Jadi Kunci

Sekretaris Daerah La Ode Harwanto bersama Wali Kota Baubau Yusran Fahim dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara (Sultra), yang berlangsung di Kantor BPJN Sultra, Selasa (31/3/2026).

Dalam pertemuan itu, pembahasan utama difokuskan pada penyelarasan program pembangunan jalan nasional dengan kebutuhan daerah, khususnya untuk membuka akses antarwilayah di kawasan kepulauan Buton yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Bupati Buton Selatan menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penggerak utama roda perekonomian masyarakat.

“Jalan adalah urat nadi ekonomi. Tanpa konektivitas yang baik, distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi akan terhambat,” ujar H. Muhammad Adios dalam pertemuan tersebut.

Ia menambahkan, keterpaduan pembangunan antara pemer-

intah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan proyek infrastruktur berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Selain itu, kolaborasi antara Kabupaten Buton Selatan dan Kota Baubau juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. Kedua wilayah dinilai memiliki keterkaitan strategis dalam aktivitas perdagangan, jasa, serta pelayanan publik.

Menurut Adios, konektivitas jalan yang baik akan memperkuat hubungan ekonomi antarwilayah sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar.

“Integrasi infrastruktur akan memperlancar mobilitas barang dan jasa serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” tambahnya.

Secara historis, pembangunan infrastruktur jalan telah menjadi tulang punggung pertumbuhan

ekonomi di berbagai negara. Di Indonesia, sejak era pembangunan nasional pada masa Orde Baru hingga program percepatan infrastruktur dalam satu dekade terakhir, pemerintah terus menempatkan sektor jalan sebagai prioritas utama.

Program pembangunan jalan nasional yang masif dalam beberapa tahun terakhir juga sejalan dengan visi besar pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, termasuk di kawasan timur Indonesia yang selama ini menghadapi tantangan geografis.

Secara global, Bank Dunia mencatat bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan dapat menurunkan biaya logistik hingga 20 persen dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah. Negara-negara kepulauan seperti Filipina dan Jepang juga menjadikan konektivitas sebagai kunci pemerataan pembangunan.

Kondisi ini relevan dengan wilayah Buton Selatan yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, seh-

ingga membutuhkan jaringan jalan yang terintegrasi untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.

Dalam audiensi tersebut, BPJN Sultra diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan daerah dengan memasukkan sejumlah ruas jalan strategis ke dalam prioritas pembangunan nasional.

Pemerintah daerah juga menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat guna memastikan percepatan realisasi pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya sinergi lintas sektor dan lintas wilayah ini, diharapkan konektivitas antara Kabupaten Buton Selatan dan Kota Baubau semakin kuat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Sulawesi Tenggara. (*)

Ruang Kelas Terbatas, SDN 1 Masiri Buton Selatan Tetap Bertahan Enam Hari Sekolah

Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh program MBG. Hingga kini, distribusi makanan bergizi gratis masih terbatas pada wilayah tertentu.

Dapur umum MBG di Batauga baru menjangkau Desa Masiri untuk dapur pertama, serta wilayah Desa Lawela hingga Laompo untuk dapur kedua. Sementara daerah lain seperti Majapahit hingga Pogalampa belum tersentuh program tersebut.

Ketimpangan ini menyebabkan tidak semua sekolah dapat menerapkan sistem yang sama, terutama karena MBG menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengaturan waktu belajar siswa di sekolah.

Selain kendala distribusi, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi persoalan. SDN 1 Masiri saat ini memiliki 10 ruang kelas dengan total 12 rombongan belajar, sehingga membutuhkan tambahan ruang untuk menunjang proses pembelajaran.

“Kami berharap ada penambahan ba-

ngunan karena jumlah rombel tidak sebanding dengan ruang kelas yang tersedia,” ujar Jalaluddin.

Pihak sekolah juga mulai menyiapkan fasilitas pendukung MBG, termasuk rencana pemanfaatan kantin sebagai tempat distribusi makanan, mengingat belum adanya dapur khusus di lingkungan sekolah.

Secara historis, kebijakan lima hari sekolah di Indonesia bukan hal baru. Wacana ini telah mengemuka sejak 2017 melalui program penguatan pendidikan karakter oleh pemerintah pusat, yang mendorong sekolah menerapkan pembelajaran lebih intensif dalam lima hari kerja.

Di tingkat global, sistem lima hari sekolah juga telah lama diterapkan di berbagai negara seperti Finlandia dan Jepang, yang menekankan keseimbangan antara akademik dan pengembangan karakter siswa melalui kegiatan non-formal.

Namun, imple-

mentasi kebijakan tersebut di Indonesia, khususnya di daerah, seringkali menghadapi tantangan berupa kesenjangan fasilitas, akses, dan dukungan program pendukung seperti penyediaan gizi siswa.

Di Buton Selatan, program MBG yang diharapkan menjadi solusi peningkatan kualitas gizi dan konsentrasi belajar siswa, masih dalam tahap distribusi terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh sekolah secara merata.

Jalaluddin menegaskan, jika kebijakan belajar dari rumah atau Work From Home (WFH) diberlakukan, maka program MBG sebaiknya dihentikan sementara.

“Kalau siswa tidak berada di sekolah, tentu penyaluran MBG tidak bisa berjalan efektif,” ujarnya.

Ke depan, pihak sekolah berharap adanya pemerataan program MBG serta peningkatan infrastruktur pendidikan agar kebijakan sistem pembelajaran dapat diterapkan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Buton Selatan. (*)

ASN Bapas Baubau Naik Pangkat, Kepala Bapas Baubau Nasiruddin Tekankan Integritas dan Inovasi

publik.

“Momentum ini harus menjadi pemicu untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” katanya.

Prosesi upacara ditandai dengan penyematan tanda pangkat baru secara simbolis oleh inspektur upacara. Selanjutnya, dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat kepada para pegawai yang berhak menerima.

Selain itu, seluruh peserta upacara memberikan ucapan selamat sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan di lingkungan kerja.

Nasirudin juga mengingatkan pentingnya menjaga kode etik profesi dan menjauhi segala bentuk penyimpangan, sejalan dengan upaya pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Setiap pegawai

harus menjaga profesionalisme dan menjauhi praktik yang bertentangan dengan aturan,” tegasnya.

Secara historis, sistem kenaikan pangkat dalam birokrasi Indonesia telah menjadi bagian dari manajemen kepegawaian sejak era reformasi birokrasi awal 2000-an, yang bertujuan meningkatkan profesionalisme ASN. Kebijakan ini diperkuat melalui berbagai regulasi nasional yang menekankan merit system dalam pengembangan karier.

Di tingkat global, praktik serupa juga diterapkan di berbagai negara dengan sistem pelayanan publik modern, seperti di Inggris dan Australia, di mana promosi jabatan berbasis kinerja menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik.

Kenaikan pangkat di lingkungan pemerintahan sendiri memiliki peran strat-

egis, mengingat tugas pembimbing kemasaryakatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan rehabilitasi bagi klien pemasaryakatan.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Upacara kemudian ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas kelancaran kegiatan sekaligus harapan agar para pegawai yang naik pangkat dapat menjalankan amanah dengan baik.

Melalui kegiatan ini, Bapas Baubau berharap dapat terus memperkuat budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. (*)

LKPD 2025 Diserahkan ke BPK, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dorong Tata Kelola Keuangan Bersih

bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik,” ujar Muhammad Adios dalam rilisnya.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang terbuka.

“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah,” katanya.

Dalam dokumen LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025, terdapat sejumlah komponen utama yang disampaikan, di antaranya laporan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Setelah penyerahan tersebut, BPK akan melakukan pemeriksaan secara rinci untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah sebelum memberikan opini resmi.

“Setelah diserahkan, BPK akan melakukan audit secara mendalam dalam kurun waktu sekitar 60 hari untuk menentukan opini atas laporan keuangan,” ungkapnya.

Secara historis, kewajiban penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia mulai diperkuat sejak reformasi keuangan negara awal 2000-an, terutama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Reformasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk be-

ralih dari sistem administrasi keuangan tradisional menuju sistem berbasis akuntabilitas dan transparansi, sejalan dengan praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat global.

Di tingkat internasional, standar pelaporan keuangan sektor publik juga terus berkembang, seperti melalui International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) yang menjadi acuan banyak negara dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Partisipasi aktif pemerintah daerah dalam penyampaian LKPD setiap tahun menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pengelolaan keuangan serta kepatuhan terhadap regulasi nasional.

Bupati Muhammad Adios menyatakan bahwa Pemerintah

Kabupaten Buton Selatan akan terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapat memperoleh opini terbaik dari BPK.

“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Penyerahan LKPD ini juga diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian integral dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

Bantah Isu Rp5 Miliar Danai Roy Suryo, JK Siapkan Laporan ke Bareskrim Polri



Jusuf Kalla akan melapor ke Bareskrim soal pencemaran nama baik yang menyebut dirinya mendanai pihak-pihak tertentu untuk mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla memastikan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Badan Reserse Kriminal Polri menyusul tuduhan dirinya mendanai polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Langkah tersebut diambil setelah beredar informasi di berbagai platform digital yang menyebutkan Jusuf Kalla memberikan dana hingga Rp5 miliar kepada sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, untuk mempersoalkan keaslian ijazah Presiden.

Jusuf Kalla menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar dan merupakan bentuk fitnah yang mencemarkan nama baiknya di ruang publik.

“Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” ujar Jusuf Kalla dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta, Minggu (5/4).

Ia menjelaskan bahwa selama ini dirinya tidak pernah terlibat dalam polemik yang berkembang terkait ijazah Presiden, termasuk tidak

memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang disebut dalam isu tersebut, seperti Roy Suryo maupun Rismon Sianipar.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa laporan ke kepolisian akan diajukan oleh tim kuasa hukumnya pada Senin (6/4), sebagai bentuk klarifikasi sekaligus langkah hukum terhadap penyebaran informasi yang dinilai menyesatkan.

Kuasa hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talaohu, menyatakan bahwa laporan tersebut kemungkinan besar akan berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik. Ia menilai tuduhan tersebut telah menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Ini adalah tuduhan fitnah sehingga harus disikapi secara serius melalui jalur hukum,” kata Abdul.

Terkait pertemuan yang berlangsung di kediamannya pada bulan Ramadan lalu, Jusuf Kalla menegaskan bahwa agenda tersebut tidak berkaitan dengan polemik ijazah Presiden.

Menurutnya, pertemuan itu merupakan forum diskusi terbuka yang

dihadiri akademi dan profesional untuk membahas kondisi bangsa serta memberikan masukan kebijakan kepada Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto.

“Itu terbuka, hanya diskusi memberi saran untuk kebijakan kepada Presiden,” ujar Jusuf Kalla.

Ia juga menambahkan bahwa para peserta hadir atas inisiatif masing-masing tanpa undangan resmi, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan agenda tertentu sebagaimana yang berkembang di masyarakat.

Secara historis, polemik terkait keaslian ijazah tokoh publik bukan hal baru, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Di dalam negeri, isu serupa pernah mencuat dalam berbagai kontestasi politik, terutama menjelang pemilihan umum, sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

Di tingkat global, kontroversi mengenai latar belakang pendidikan juga pernah dialami sejumlah pemimpin dunia, seperti perde-

batan mengenai dokumen akademik yang muncul dalam proses verifikasi kandidat politik di beberapa negara.

Pengamat komunikasi politik menilai bahwa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di era digital berpotensi memperkeruh ruang publik jika tidak diimbangi dengan klarifikasi dan penegakan hukum.

Kasus yang melibatkan Jusuf Kalla ini pun mencerminkan tantangan tersebut, di mana figur publik kerap menjadi sasaran disinformasi yang cepat menyebar melalui media sosial.

Dengan rencana pelaporan ke kepolisian, Jusuf Kalla berharap publik memperoleh kejelasan serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Langkah hukum ini sekaligus menjadi upaya untuk menjaga integritas ruang publik dan mendorong akuntabilitas dalam penyebaran informasi di era digital. (*)

Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, SBY Minta UNIFIL Dihentikan



SBY mendesak PBB hentikan penugasan UNIFIL setelah gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-Gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi perdamaian di Lebanon memicu desakan dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, agar Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mengevaluasi dan menghentikan penugasan pasukan dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Desakan tersebut muncul setelah rangkaian insiden dalam sepekan terakhir menyebabkan tiga prajurit Indonesia tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka saat bertugas di wilayah konflik Lebanon selatan.

“Tiga prajurit kita gugur dalam situasi yang sangat berbahaya. PBB harus segera mengambil langkah tegas, apakah menghentikan atau memindahkan pasukan dari zona pertempuran,” ujar SBY dalam pernyataannya di akun X, Minggu (5/4).

Ketiga prajurit yang gugur masing-masing adalah Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, dan Serutu Muhammad Nur Ichwan. Mereka tewas dalam insiden berbeda yang terjadi pada 29 dan 30 Maret di sekitar wilayah penugasan UNIFIL.

Menurut keterangan UNIFIL, Praka Farizal Rhomadhon meninggal dunia akibat ledakan proyektil di dekat pos Indonesia di Desa Adchit Al Qusayr. Sementara dua prajurit lainnya gugur akibat ledakan dari sumber yang belum teridentifikasi.

Selain korban jiwa, beberapa personel TNI lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, termasuk luka berat, dalam insiden terpisah yang terjadi di lokasi penugasan yang sama.

SBY menilai kondisi di lapangan telah berubah drastis dari zona

penjaga perdamaian menjadi wilayah pertempuran aktif akibat meningkatnya konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah. “Peacekeeper itu bertugas menjaga perdamaian, bukan berperang. Mereka tidak dipersenjatai untuk menghadapi konflik terbuka,” kata SBY menegaskan.

Ia menjelaskan bahwa mandat pasukan penjaga perdamaian PBB berada dalam kerangka Bab VI Piagam PBB, yang berfokus pada upaya menjaga stabilitas, bukan penegakan perdamaian melalui kekuatan militer sebagaimana diatur dalam Bab VII.

Dalam konteks tersebut, SBY menilai penempatan pasukan di wilayah yang kini telah menjadi zona perang merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar operasi penjaga perdamaian. “Seharusnya mereka berada di Blue Line, bukan di wilayah yang sudah menjadi medan pertempuran,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan laporan bahwa pasukan Israel telah bergerak sejauh sekitar tujuh kilometer dari garis demarkasi Blue Line, sehingga meningkatkan ancaman langsung terhadap keselamatan pasukan UNIFIL, termasuk kontingen Indonesia.

SBY mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang darurat guna membahas situasi tersebut dan menghasilkan resolusi yang jelas terkait kelanjutan misi UNIFIL.

Selain itu, ia mendukung langkah pemerintah Indonesia yang meminta investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. “Indonesia berhak mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan atas insiden ini,” ucapnya.

Secara historis, keterlibatan Indonesia dalam misi penjaga

perdamaian PBB telah berlangsung sejak 1957 melalui pengiriman Kontingen Garuda ke Sinai dalam misi United Nations Emergency Force. Sejak saat itu, Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian dunia.

Dalam konteks UNIFIL, misi ini dibentuk pada 1978 melalui Resolusi 425 dan 426 Dewan Keamanan PBB, menyusul konflik antara Israel dan Lebanon. Misi ini bertujuan menjaga stabilitas di wilayah perbatasan dan memastikan penarikan pasukan Israel dari Lebanon.

Namun, dinamika konflik yang terus berulang di kawasan tersebut, termasuk perang Israel-Hizbullah pada 2006, menunjukkan bahwa wilayah operasi UNIFIL tetap memiliki tingkat risiko tinggi bagi pasukan penjaga perdamaian.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon kembali meningkat, terutama sejak pecahnya konflik regional yang melibatkan berbagai aktor non-negara, sehingga memperumit mandat dan pelaksanaan tugas UNIFIL di lapangan.

Pemerintah Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus mengevaluasi keselamatan personel di wilayah konflik.

Peristiwa ini kembali menyoroti tantangan besar yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian di tengah eskalasi konflik global, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mandat dan perlindungan bagi peacekeeper di zona rawan. (*)

Gubernur Sultra ASR Perkuat Meritokrasi, Seleksi Pejabat Lewat Wawancara



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mempercepat reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem merit berbasis manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN), termasuk menjalin kerja sama strategis dengan Jawa Barat untuk memperkuat sistem tersebut secara digital dan terintegrasi.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama implementasi sistem merit yang berlangsung di kantor Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat pada 2 April 2026, melibatkan sejumlah pejabat dari kedua provinsi.

Kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan aplikasi manajemen talenta ASN, yang memungkinkan pemetaan kompetensi, potensi, serta kualifikasi pegawai secara komprehensif berbasis teknologi informasi.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa penerapan sistem merit menjadi prioritas utama dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik penyimpangan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat, bukan karena kedekatan, tetapi karena kompetensi dan integritas," ujar Andi

dalam keterangannya.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, gubernur bahkan turun langsung melakukan wawancara terhadap calon pejabat administrator dan pengawas di lingkup pemerintah provinsi.

Proses wawancara ini berlangsung sejak 30 Maret 2026 dan masih berlanjut hingga awal April, di sela agenda kerja gubernur yang padat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara, Andi Khaeruni, menyebutkan bahwa tahapan ini merupakan bagian akhir dari proses seleksi yang ketat dan berlapis.

"Hingga 2 April, wawancara masih berjalan dan akan dilanjutkan pekan depan untuk menyelesaikan seluruh kandidat," kata Andi Khaeruni.

Ia menambahkan, proses seleksi diawali dari usulan kepala perangkat daerah, kemudian dilanjutkan dengan asesmen menyeluruh oleh BKD terhadap berbagai aspek, mulai dari pangkat, pendidikan, pengalaman, hingga integritas.

Dari hasil asesmen tersebut, tiga kandidat terbaik untuk setiap jabatan dipilih untuk mengikuti wawancara langsung oleh gubernur sebelum diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara guna memperoleh persetujuan teknis.

Menurut Andi

Khaeruni, pendekatan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menutup celah praktik gratifikasi dan nepotisme dalam pengisian jabatan.

"Ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi penilaian langsung terhadap kapasitas dan karakter calon pejabat," ujarnya.

Penerapan sistem merit di Sulawesi Tenggara sejalan dengan kebijakan nasional yang telah digariskan pemerintah pusat sejak disahkannya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas birokrasi.

Secara historis, reformasi birokrasi di Indonesia mulai menguat pasca Reformasi 1998, yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengisian jabatan publik.

Dalam konteks global, penerapan meritokrasi juga telah menjadi praktik umum di berbagai negara maju seperti Singapura dan Korea Selatan, yang mengadopsi sistem seleksi berbasis kompetensi untuk menjaga kualitas pelayanan publik.

Penggunaan aplikasi manajemen talenta ASN yang akan diadopsi Pemprov Sultra merupakan bagian dari tren internasional dalam

digitalisasi birokrasi, yang memungkinkan pengelolaan sumber daya manusia secara lebih objektif dan terukur.

Sebagai tindak lanjut kerja sama dengan Jawa Barat, Pemprov Sultra akan mengirimkan aparaturnya untuk mengikuti program pemagangan guna mempercepat alih teknologi dan implementasi sistem tersebut.

Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat merancang pola karier ASN secara lebih sistematis, termasuk perencanaan suksesi jabatan dan pengembangan kompetensi jangka panjang.

Andi Sumangerukka menegaskan bahwa seluruh langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kami ingin ASN Sultra menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi," ujarnya.

Dengan pendekatan meritokrasi yang semakin kuat, Pemprov Sulawesi Tenggara optimistis mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil. (*)

Dorong Statistik Terintegrasi, Sultra Siap Sukseskan Sensus Ekonomi 2026



Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan penuh mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan pembangunan berbasis data yang lebih akurat, inklusif, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik di Aula Utama BPS Provinsi Sultra, Rabu (1/4/2026), yang menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sistem statistik di daerah.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry B. Harmadi, menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan instrumen penting untuk memotret struktur dan dinamika ekonomi secara menyeluruh.

"Sensus Ekonomi 2026 menjadi agenda strategis nasional untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat secara komprehensif dan dapat dijadikan dasar kebijakan yang responsif," ujarnya.

Secara historis, sensus ekonomi di Indonesia telah dilaksanakan secara berkala sejak 1986 oleh Badan Pusat Statistik, dengan interval sepuluh tahunan, sebagai upaya memetakan sektor usaha dari skala mikro hingga besar. Di tingkat global, praktik serupa juga dilakukan oleh berbagai negara melalui lembaga statistik nasional maupun organisasi seperti United Nations Statistics Division untuk memastikan ketersediaan data ekonomi yang kredibel.

Dalam konteks daerah, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi

Sumangerukka, menekankan pentingnya menjadikan data sebagai fondasi utama kebijakan publik.

"Ke depan, seluruh kebijakan harus berbasis data. Tanpa itu, program berisiko tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat," kata Andi.

Ia mengungkapkan, masih terdapat program yang belum sepenuhnya ditopang data valid, sehingga efektivitas intervensi pemerintah belum optimal, termasuk dalam pengendalian inflasi dan penanganan kemiskinan.

"Operasi pasar, misalnya, belum sepenuhnya efektif karena belum berbasis pada pemetaan kebutuhan yang akurat," ujarnya menambahkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Sultra mendorong penggunaan data resmi dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia sebagai rujukan utama dalam perencanaan kebijakan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengembangkan sistem informasi statistik terintegrasi guna meningkatkan sinkronisasi data antar perangkat daerah serta memperkuat tata kelola data sektoral.

Upaya tersebut turut diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik, termasuk penguatan peran pembina data dan wali data di daerah.

Secara kinerja ekonomi, Sulawesi Tenggara menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi daerah ini pada 2025 mencapai sekitar 5,79 persen dan masuk dalam lima besar nasional.

Tidak hanya itu, jumlah unit usaha dalam satu dekade terakhir meningkat hingga sekitar 200 persen, mencerminkan pertumbuhan sektor riil yang signifikan.

Di bidang tata kelola data, Sultra juga mencatatkan prestasi dengan masuk delapan besar nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 serta meraih penghargaan Anindita Wistara Data.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyatakan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap implementasi kebijakan statistik.

"Kami ingin memastikan koordinasi antarinstansi, standarisasi data, serta kapasitas SDM statistik terus diperkuat agar data benar-benar dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa DPR RI tengah menyerap berbagai masukan dari daerah sebagai bahan penyempurnaan regulasi, termasuk rencana revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Revisi regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem statistik nasional sekaligus memperjelas peran pemerintah daerah dalam pengelolaan data sektoral.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan seluruh kebijakan publik ke depan benar-benar berbasis bukti dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

"Kita ingin memastikan setiap kebijakan publik berbasis bukti, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Andi Sumangerukka. (*)

Bupati Busel H Muh Adios Resmikan Turnamen Futsal Lampanairi, Dorong Pemuda Berprestasi Lewat Turnamen Futsal Desa



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, secara resmi membuka Turnamen Futsal Desa Lampanairi, Kecamatan Batauga, sebagai upaya mendorong pembinaan generasi muda melalui olahraga sekaligus memperkuat nilai sportivitas dan kebersamaan di tingkat desa.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa turnamen tersebut bukan sekadar kompetisi, melainkan sarana strategis untuk membangun karakter, kedisiplinan, dan mental juang pemuda di daerah.

"Turnamen ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana kalian membentuk karakter, disiplin, dan tanggung jawab sebagai generasi penerus," ujar Muhammad Adios.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga perilaku dan menjauhi hal-hal negatif, termasuk minuman keras (miras), yang dinilai dapat merusak masa depan generasi muda.

"Kalau ingin

menjadi polisi atau tentara, jauhi miras. Itu bisa merusak masa depan kalian," tegasnya.

Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dihadiri Camat Batauga, unsur TNI dari Koramil Batauga, Kepala Desa Lampanairi, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang antusias menyaksikan pembukaan turnamen.

Suasana semakin semarak ketika yel-yel penyemangat dipimpin oleh Siti Norma Adios, yang mengajak peserta meneriakkan "Petarung! Petarung! Petarung!" sebagai simbol semangat bertanding.

"Kalau saya bilang Turnamen Futsal Desa Lampanairi, jawabannya Petarung! Petarung! Petarung! Itu tanda kalian siap bertanding," ucapnya dalam orasi singkat yang disambut riuh peserta.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa peran pemuda sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan desa.

Menurutnya, stabilitas sosial di Desa Lampanairi

sangat bergantung pada kesadaran kolektif generasi muda dalam menjaga diri dan lingkungannya.

"Kemanan desa ada di tangan kalian. Kalian harus mampu menjaga diri dan lingkungan," katanya.

Ia juga menyampaikan optimisme bahwa dari ajang seperti ini akan lahir generasi yang mampu berkontribusi lebih besar, bahkan menjadi pemimpin daerah di masa depan.

"Tidak menutup kemungkinan dari sini akan lahir anggota DPR atau bahkan Bupati Buton Selatan," ujarnya.

Secara historis, olahraga futsal sendiri telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan di Uruguay pada 1930-an, sebelum kemudian diakui secara global oleh FIFA sebagai salah satu cabang olahraga resmi. Di Indonesia, futsal mulai populer pada awal 2000-an dan menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet usia muda.

Turnamen di tingkat desa seperti yang digelar di Lampanai-

ri dinilai sejalan dengan upaya nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui olahraga, sebagaimana tertuang dalam berbagai program pembinaan pemuda dan olahraga oleh pemerintah.

Selain aspek kompetisi, kegiatan ini juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempererat hubungan antarwarga serta memperkuat nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Di akhir acara, Bupati menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kegiatan kepemudaan yang bersifat positif dan konstruktif.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Turnamen Futsal Desa Lampanairi secara resmi saya buka," pungkasnya.

Turnamen ini diharapkan mampu menjadi agenda rutin yang tidak hanya melahirkan atlet berbakat, tetapi juga membentuk generasi muda yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat lokal maupun nasional. (*)

Sidak RSUD Buton, Bupati Alvin Tekankan Pelayanan Kesehatan Optimal



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal setelah libur panjang Idulfitri. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Kabupaten Buton, Kamis (26/3/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Alvin menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang tidak boleh mengalami penurunan kualitas, terutama pada masa transisi pascalibur panjang. Ia menyebutkan bahwa keberlangsungan layanan medis menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

"Saya ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima, kapan pun, termasuk setelah libur panjang," ujar Alvin saat meninjau langsung kondisi rumah sakit.

Sidak yang dilakukan pada hari kedua masuk kerja itu mencakup sejumlah unit layanan strategis, seperti ruang pendaftaran, instalasi rawat jalan, hingga ruang perawatan pasien. Peman-tauan dilakukan secara langsung guna melihat kesiapan tenaga me-

dis serta kelancaran sistem pelayanan.

Dari hasil peninjauan tersebut, pelayanan di RSUD Kabupaten Buton terpantau berjalan dengan baik. Tenaga medis telah kembali aktif menjalankan tugas, dan seluruh unit layanan beroperasi normal seperti sebelum masa libur.

Bupati Alvin juga berdialog dengan sejumlah pasien dan keluarga pasien untuk memperoleh gambaran langsung terkait kualitas pelayanan. Mayoritas pasien mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit.

"Alhamdulillah, dari hasil sidak hari ini, pelayanan berjalan baik dan tenaga medis sudah kembali aktif melayani," tambahnya.

Ia turut memberikan apresiasi kepada tenaga medis yang tetap menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas, meskipun baru saja melewati masa libur Lebaran yang cukup panjang.

Dalam konteks yang lebih luas, pelayanan kesehatan pascalibur menjadi perhatian nasional. Berdasarkan pengalamannya, lonjakan pasien sering terjadi setelah Idulfitri, terutama akibat kelelahan perjalanan mudik

dan perubahan pola makan.

Secara historis, Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa tren peningkatan kunjungan pasien pascalibur telah terjadi sejak satu dekade terakhir. Hal serupa juga terjadi di berbagai negara, seperti di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan, di mana momentum hari raya kerap diikuti peningkatan kebutuhan layanan kesehatan.

Kondisi tersebut menuntut kesiapan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit daerah, agar mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Bupati Alvin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh layanan publik, khususnya sektor kesehatan.

"Kami akan terus melakukan evaluasi agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan bahkan meningkat dari waktu ke waktu," tegasnya.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah. (*)

Kemenkes Terbitkan SE Kewaspadaan Campak, Tenaga Medis Diminta Siaga

Pemerintah Optimalkan One Way dan Layanan Medis Arus Balik



Ilustrasi

Laporan: Andina L

JAKARTA- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/1602/2026 tentang kewaspadaan terhadap penyakit campak, khususnya bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, menyusul meningkatnya kasus di sejumlah wilayah.

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang dilaporkan di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan data hingga minggu ke-11 tahun 2026, tercatat sebanyak 58 kejadian luar biasa campak di 39 kabupaten/kota yang tersebar di 14 provinsi. Jumlah kasus pada awal tahun sempat mencapai 2.740, namun saat ini dilaporkan menurun menjadi 177 kasus.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit, Andi Saguni, menyampaikan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi kelompok yang paling rentan tertular karena tingginya intensitas interaksi dengan pasien.

Ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah pasien campak yang membutuhkan perawatan di rumah sakit turut meningkatkan risiko penularan di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.

“Dengan meningkatnya kasus campak dan tingginya angka perawatan di rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi kelompok yang berisiko tinggi,” ujar Andi dalam keterangannya.

Sebagai langkah pengendalian, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program Outbreak Response Immunization (ORI) serta Catch-Up Campaign (CUC) Campak/MR di 102 kabupaten/kota dengan sasaran anak usia 9 hingga 59 bulan.

Meski demikian, pemerintah menilai kewaspadaan tetap perlu diperkuat, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi titik krusial dalam penanganan pasien.

Melalui surat edaran tersebut, seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan diinstruksikan untuk meningkatkan langkah pencegahan, termasuk melakukan skrining dan triase sejak dini terhadap pasien dengan gejala campak.

Selain itu, fasilitas kesehatan juga diminta menyiapkan ruang isolasi khusus, memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD), serta memperkuat sistem pengendalian dan pencegahan infeksi.

Tenaga medis dan tenaga kesehatan juga diimbau untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan serta segera melaporkan apabila mengalami gejala yang mengarah pada campak.

Menurut Andi, respons cepat dari tenaga kesehatan menjadi kunci penting dalam mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas.

“Kami mengimbau seluruh tenaga kesehatan untuk tetap disiplin menjalankan protokol pencegahan dan segera melaporkan jika menemukan kasus suspek,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa seluruh kasus suspek campak wajib dilaporkan maksimal dalam waktu 24 jam melalui sistem surveilans yang telah ditetapkan.

Dengan diterbitkannya surat edaran ini, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi penyebaran campak.

Upaya ini juga diharapkan mampu melindungi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan sekaligus menekan angka penularan di masyarakat.*



SEMARANG- Pemerintah memastikan pengamanan arus balik Lebaran tahun ini berjalan optimal melalui penguatan layanan kesehatan, rekayasa lalu lintas, serta edukasi keselamatan bagi masyarakat, guna menekan risiko kecelakaan dan menjaga kelancaran perjalanan.

Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai titik strategis seperti rest area dan pos kesehatan di sepanjang jalur arus balik, terutama bagi para pengemudi yang berisiko mengalami kelelahan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kondisi fisik pengemudi menjadi faktor krusial dalam keselamatan perjalanan.

“Kami ingin memastikan masyarakat kembali dari mudik dalam kondisi sehat dan selamat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengemudi yang mengalami kelelahan dan mengantuk masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas saat periode arus mudik dan balik. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk beristirahat setiap tiga jam perjalanan.

Selain aspek kesehatan, pemerintah juga menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang meningkat signifikan saat arus balik.

Menteri Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi terpadu pemerintah dalam menjaga kelancaran arus kendaraan.

“Penerapan jalur satu arah ini merupakan upaya untuk mengurangi kepadatan arus balik sekaligus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan Pratikno saat meninjau langsung pelaksanaan arus balik di Gerbang Tol Kalikan-gung, Semarang, Jawa Tengah, yang menjadi salah satu titik krusial pergerakan kendaraan dari arah barat ke timur Pulau Jawa.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan arus balik tidak terlepas dari sinergi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari kepolisian, kementerian terkait, hingga operator jalan tol.

“Ini adalah bentuk kerja bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah juga mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih aman, seperti layanan pengangkutan sepeda motor menggunakan kereta api, guna mengurangi beban lalu lintas di jalan raya sekaligus menekan potensi kecelakaan.

Data sementara menunjukkan bahwa angka kecelakaan selama arus mudik dan balik Lebaran tahun ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan penguatan sistem pengendalian lalu lintas dan layanan kesehatan.

tan sistem pengendalian lalu lintas dan layanan kesehatan.

Secara historis, upaya pengamanan arus mudik dan balik telah mengalami perkembangan signifikan dalam satu dekade terakhir. Sejak diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas terpadu pada awal 2010-an, angka kecelakaan cenderung menurun, meskipun volume kendaraan terus meningkat setiap tahunnya.

Di tingkat global, praktik pengelolaan arus perjalanan massal saat hari besar juga diterapkan di berbagai negara. Misalnya, pengaturan lalu lintas saat libur Tahun Baru Imlek di Tiongkok atau musim liburan musim panas di Eropa yang mengedepankan kombinasi rekayasa lalu lintas dan layanan kesehatan publik.

Pendekatan serupa menunjukkan bahwa keselamatan perjalanan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga kesiapan fisik pengguna jalan serta efektivitas koordinasi antarinstansi.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan serta tetap menjaga kondisi kesehatan selama perjalanan demi keselamatan bersama.(Lisna)

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <p>PT FAREN GRAFIKA</p> <p>Harian Pagi Baubau Post</p> <p>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruaoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p> | <p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval</p> | <p>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin</p> | <p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p> | <p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: Rahim Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p> |
| <p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p> | | | | |

Aktivistis Diserang, Dari Babel ke Jakarta, Kasus Air Keras Berulang dan Mengkhawatirkan



Ilustrasi

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Gelombang kasus penyiraman air keras kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Rentetan kejadian yang melibatkan korban dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis, memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat dan menimbulkan pertanyaan serius terkait motif serta pola serangan.

Peristiwa terbaru terjadi di Bangka Belitung, ketika seorang aktivis lingkungan, Muhammad Rosidi, diduga menjadi korban penyiraman air keras pada Senin (30/3) malam di Toboali. Serangan dilakukan saat korban berada di dalam mobil, ketika pelaku melemparkan cairan asam yang menyebabkan luka bakar di sejumlah bagian tubuh.

Menanggapi insiden tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI mendesak aparat kepolisian bertindak tegas dan segera menangkap pelaku. "Saya minta Kapolda Bangka Belitung tegas dan langsung turun tangan. Siapa pun pelakunya harus segera diungkapkan ke publik seterang-terangnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4).

Ia juga menilai pola serangan ini mengindikasikan ancaman serius. "Ini jelas teror terstruktur, bukan hanya buat aktivis, tetapi juga buat kita semua. Ini benar-benar sudah sangat mengkhawatirkan," katanya.

Kasus lain terjadi di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, di mana seorang pria diserang oleh dua orang tak dikenal sepulang salat Subuh pada Senin (30/3). Pelaku yang berboncengan sepeda motor menyiramkan cairan berbahaya ke arah korban sebelum melarikan diri.

Pihak kepolisian menyatakan telah menangkap pelaku dalam kasus tersebut, meskipun identitas dan motifnya belum diungkap. "Iya, pelaku sudah ditangkap," kata Kapolres Metro Bekasi melalui pesan singkat, seraya menambahkan bahwa detail kasus akan disampaikan dalam konferensi pers lanjutan.

Sebelumnya, kasus yang menjadi perhatian publik terjadi di Jakarta, menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Ia diserang pada Kamis (12/3) malam usai menghadiri acara di kantor YLBHI oleh orang tak dikenal.

Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka serius di bagian tangan, wajah, dada, serta mata. Pihak KontraS menyebut kondisi korban cukup parah dan membutuhkan penanganan medis intensif.

Dalam perkembangan kasus, empat anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 18 Maret 2026. Penanganan perkara kini berada di bawah Pusat Polisi

Militer TNI, setelah sebelumnya ditangani oleh kepolisian.

Koordinator KontraS menyampaikan kronologi kejadian dalam keterangan tertulis. "Korban mengalami serangan penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal yang mengakibatkan luka serius di sejumlah bagian tubuh," ujarnya.

Meski sejumlah pelaku telah ditangkap dalam beberapa kasus, motif di balik serangan tersebut belum sepenuhnya terungkap. Hal ini menambah kekhawatiran publik terhadap potensi berulangnya kejadian serupa.

Secara historis, kasus penyiraman air keras bukan hal baru di Indonesia. Salah satu yang paling menyita perhatian publik adalah penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan pada 2017, yang menyebabkan kerusakan permanen pada mata korban dan memicu desakan reformasi penegakan hukum.

Fenomena serupa juga terjadi di tingkat global. Di sejumlah negara seperti India, Bangladesh, dan Pakistan, serangan air keras kerap digunakan sebagai bentuk kekerasan berbasis dendam pribadi maupun konflik sosial. Organisasi internasional mencatat ribuan kasus terjadi setiap tahun, terutama

ma terhadap perempuan.

Penggunaan air keras sebagai alat kekerasan dinilai berbahaya karena dampaknya yang tidak hanya menyebabkan luka fisik serius, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang bagi korban.

Pengamat hukum menilai bahwa lemahnya pengawasan terhadap distribusi bahan kimia berbahaya menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya kejahatan ini. Selain itu, penegakan hukum yang lambat dalam mengungkap motif turut memperburuk situasi.

Rangkaian kasus terbaru ini menunjukkan bahwa ancaman penyiraman air keras masih nyata dan berpotensi meluas jika tidak ditangani secara serius. Aparat penegak hukum didesak tidak hanya mengungkap pelaku, tetapi juga mengidentifikasi motif serta kemungkinan adanya pola terorganisir.

Dengan meningkatnya kasus dalam waktu berdekatan, publik berharap pemerintah dan aparat keamanan dapat mengambil langkah preventif yang lebih tegas untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan serupa di masa mendatang. (*)

Dua Siswa Terluka Diduga Peluru Nyasar, TNI AL Buka Ruang Dialog



Ilustrasi. TKP penembakan peluru nyasar

Laporan: Hadi

SURABAYA, BP-Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan dugaan insiden peluru nyasar yang melukai dua siswa di Kabupaten Gresik secara transparan dan profesional. Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan asal proyektil yang menyebabkan luka pada korban.

Kasus ini mencuat setelah dua siswa SMP Negeri 33 Gresik, masing-masing berinisial DFH (14) dan R, mengalami luka akibat proyektil yang diduga berasal dari latihan militer. Peristiwa tersebut terjadi pada 17 Desember 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, saat para siswa mengikuti kegiatan di lingkungan sekolah.

DFH mengalami luka serius pada lengan kiri hingga mengenai tulang dan proyektil bersarang di bagian punggung kanan bawah. Keduanya segera dilarikan ke RS Siti Khodijah Sepanjang untuk menjalani operasi dan perawatan medis.

Dugaan awal mengarah pada aktivitas latihan tembak prajurit TNI AL yang berlangsung di Lapangan Tembak Bumi Marinir Karangpilang, Kota Surabaya, yang berjarak sekitar 2,3 kilometer dari lokasi sekolah. Latihan tersebut diketahui melibatkan empat batalyon, yakni Zeni, Angmor, Polisi Militer, dan Taifib.

Perwira Hukum Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir, Ahmad Fauzi, menyatakan pihaknya segera melakukan langkah cepat sejak menerima laporan kejadi-

an. "Sejak awal kami langsung melakukan koordinasi, mendatangi lokasi, dan memastikan korban mendapat penanganan medis yang maksimal," ujarnya dalam keterangan resmi.

Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada kepastian bahwa proyektil tersebut berasal dari Korps Marinir. "Kami masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan asal peluru tersebut," kata Fauzi.

TNI AL, lanjutnya, telah menanggung seluruh biaya pengobatan korban, termasuk operasi pembedahan proyektil, perawatan lanjutan, serta memberikan santunan kepada keluarga. Upaya tersebut disebut sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap korban.

Namun demikian, proses mediasi antara kedua pihak belum mencapai titik temu. Pihak keluarga korban melalui kuasa hukum mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp3,375 miliar untuk kedua korban.

"Tuntutan tersebut menurut kami belum mencerminkan asas kepatutan dan keadilan, sehingga proses mediasi belum menghasilkan kesepakatan," ujar Fauzi.

TNI AL juga membantah adanya tuduhan intimidasi terhadap keluarga korban. "Tidak pernah ada tindakan intimidatif. Kehadiran personel di rumah sakit murni untuk pendalaman teknis dan dilakukan secara terbuka," tegasnya.

Di sisi lain, keluarga korban menyampaikan adanya tekanan selama proses perawatan di rumah sakit. Ibunda DFH menyebutkan anaknya mengalami gangguan fungsi pada lengan akibat

luka tembak tersebut. Selain itu, keluarga juga mengaku diminta menyerahkan proyektil yang telah diangkat, namun menolaknya hingga proses hukum selesai.

Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) untuk ditindaklanjuti secara hukum. Salah satu keluarga korban lainnya disebut telah memilih penyelesaian secara kekeluargaan.

Dalam konteks yang lebih luas, insiden peluru nyasar bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Sejumlah kasus serupa pernah dilaporkan di beberapa daerah, terutama yang berdekatan dengan area latihan militer atau kepolisian. Secara internasional, kasus stray bullet juga kerap terjadi di negara-negara yang memiliki fasilitas latihan militer terbuka, seperti di Amerika Serikat dan India, yang kemudian mendorong pengetatan standar keamanan latihan.

Pengamat keamanan menilai, insiden seperti ini menjadi penguat pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan dalam latihan tembak, termasuk pengamanan radius aman dan mitigasi risiko terhadap permukiman warga.

TNI AL mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu hasil penyelidikan resmi. "Kami membuka ruang dialog dan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran," kata Fauzi.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut keselamatan warga sipil, khususnya pelajar, sekaligus menguji transparansi serta akuntabilitas institusi militer dalam menangani insiden yang berdampak langsung pada masyarakat. (*)

Bulog Baubau Rampungkan Distribusi Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter ke 3.857 PBP di Kecamatan Wolio



Senin, 30/03/2026

Janji Jiwa, Jl. Sultan Hasanuddin, Batulo, Wolio, Kota Bau - Bau, Sulawesi Tenggara, 93717

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Sebanyak 3.857 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, menerima bantuan beras dan minyak goreng untuk alokasi Februari dan Maret 2026 yang disalurkan oleh Perum BULOG Cabang Baubau. Adapun total penerima bantuan di Kota Baubau per alokasi mencapai 14.926 PBP, yang menjadi bagian dari program bantuan pangan nasional dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Penyaluran bantuan di Kecamatan Wolio, Kota Baubau telah rampung pada Senin, 30 Maret 2026, setelah seluruh logistik diantar ke kantor kelurahan yang tersebar di wilayah Kecamatan Wolio.

Pimpinan Perum BULOG Cabang Baubau Ritno mengungkapkan bahwa distribusi bantuan pangan dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh penerima memperoleh haknya sesuai data yang telah ditetapkan pemerintah.

“Penyaluran bantuan pangan ini sementara kami fokuskan di Kecamatan Wolio, dan seluruh bantuan sudah kami distribusikan ke kantor kelurahan,” ujar Ritno.

Di Kecamatan Wolio sendiri, bantuan tersebar di tujuh kelurahan dengan rincian Kelurahan Bataraguru sebanyak 966 PBP, Bukit Wolio Indah 910 PBP, Kadolokatapi 677 PBP, Wangkanapi 599 PBP, Batulo 314 PBP, Tomba 296 PBP, serta Wale sebanyak 95 PBP.

Menurut Ritno, seluruh bantuan telah lebih dulu didistribusikan ke masing-masing kelurahan sebelum dibagikan kepada masyarakat penerima.

“Beras dan minyaknya sudah kami antar ke seluruh kantor kelurahan di Kecamatan Wolio, sehingga proses pembagian kepada masyarakat bisa segera dilakukan,” katanya.

Ia menambahkan, program bantuan pangan ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah tekanan

ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.

“Harapannya program ini terus berjalan, karena masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan pangan ini,” ujarnya.

Secara historis, program bantuan pangan pemerintah melalui BULOG merupakan kelanjutan dari berbagai kebijakan perlindungan sosial di Indonesia, seperti program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) yang dimulai sejak akhir 1990-an pasca krisis ekonomi Asia 1997-1998.

Program tersebut kemudian bertransformasi menjadi Rastra dan kini menjadi Bantuan Pangan yang lebih terarah dengan basis data terpadu, guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Di tingkat global, intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan pangan juga menjadi strategi umum yang diterapkan banyak negara untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, terutama saat terjadi krisis pangan dunia seperti pada periode 2007-2008

dan dampak pandemi COVID-19 sejak 2020.

Organisasi seperti World Food Programme (WFP) bahkan mencatat bahwa bantuan pangan langsung menjadi salah satu instrumen paling efektif dalam mengurangi kerentanan masyarakat miskin terhadap gejolak harga pangan.

Dengan demikian, penyaluran bantuan pangan di Kota Baubau tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan lokal, tetapi juga sejalan dengan praktik global dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Pemerintah bersama BULOG diharapkan terus menjaga konsistensi program ini agar mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Distribusi yang telah rampung di tingkat kelurahan diharapkan mempercepat penyaluran kepada warga, sehingga manfaat bantuan dapat segera dirasakan oleh masyarakat penerima. (*)

Walikota Baubau H Yusran Fahim Perkuat Stabilitas Daerah Lewat Rapat Forkopimda untuk Dorong Pembangunan



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas daerah melalui penguatan sinergi lintas sektor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rapat koordinasi yang digelar di kawasan Monumen Oputa Yi Koo, Kotamara, Minggu (5/4/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, dan dihadiri jajaran pimpinan daerah sebagai bagian dari upaya merespons dinamika strategis yang berkembang di wilayah Baubau.

Dalam forum tersebut, isu pengelolaan aset daerah justru menjadi salah satu pembahasan penting yang mendapat perhatian khusus. Pemerintah Kota Baubau mengungkapkan bahwa proses pengalihan aset dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan progres signifikan.

Sebagian besar aset, menurut Wali Kota, telah melalui tahap konfirmasi dua pekan sebelumnya. Sementara itu, proses administrasi untuk sisa aset ditargetkan rampung dalam bulan April 2026.

“Sebagian besar daftar aset sudah dikonfirmasi. Sisanya kita dorong agar selesai dalam waktu dekat supaya bisa segera dimanfaatkan,” ujar Yusran Fahim.

Ia menambahkan bahwa kesiapan pemerintah kota dalam mengelola aset tersebut tidak menjadi kendala berarti. Menurutnya,

penataan sederhana sudah cukup untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset demi kepentingan publik. “Saya kira tidak terlalu susah. Yang penting kita tata sedikit saja sudah bisa langsung dikelola dengan baik,” katanya.

Di sisi lain, penguatan stabilitas keamanan menjadi agenda utama dalam rapat tersebut. Wali Kota menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau keamanan terjaga, maka aktivitas ekonomi masyarakat juga akan berjalan lancar dan berkembang,” ujarnya menegaskan.

Pengawasan di titik-titik rawan konflik juga menjadi perhatian bersama. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi ketertiban masyarakat tetap kondusif, terutama dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata yang tengah digencarkan.

Menurut Yusran, sinkronisasi antarinstitusi menjadi kunci agar pembangunan di berbagai sektor, termasuk pariwisata, dapat berjalan selaras dengan kondisi keamanan.

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Baubau Wa Ode Hamsinah Bolu, Ketua DPRD Ardin Jufri, Kapolres Mayestika Hidayat, serta unsur TNI, kejaksaan, dan perangkat daerah lainnya.

Secara historis, pendekatan kolaboratif melalui forum seperti Forkopimda

bukan hal baru dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sejak era reformasi pasca Reformasi 1998, koordinasi lintas institusi menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas daerah.

Bahkan, secara global, model koordinasi serupa juga diterapkan di berbagai negara untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi, seperti melalui mekanisme inter-agency coordination di Amerika Serikat dan dewan keamanan regional di Eropa.

Dalam konteks nasional, stabilitas daerah terbukti berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Data pemerintah menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat keamanan tinggi cenderung memiliki investasi lebih stabil dan pertumbuhan sektor riil yang lebih cepat.

Oleh karena itu, langkah Pemerintah Kota Baubau memperkuat sinergi Forkopimda dinilai sebagai strategi penting untuk menjaga momentum pembangunan di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Dengan adanya percepatan pengalihan aset serta penguatan koordinasi keamanan, Pemerintah Kota Baubau diharapkan mampu memperluas ruang pembangunan, khususnya dalam peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik bagi masyarakat. (*)